

Pengaruh relaksasi pajak, sosialisasi pajak, dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan WPKB di Kalimantan Timur

Nina Subagio Achmari^{1✉}, Aspyan Noor²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, Samarinda.

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh relaksasi pajak, sosialisasi pajak, dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kalimantan Timur. Jenis dan sumber data dari penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan data primer dan menggunakan pengukuran skala likert. Penentuan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan *purposive sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Metode analisis dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda yang diolah dengan menggunakan program SPSS versi 22. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa relaksasi pajak dan pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kalimantan Timur sedangkan sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kalimantan Timur.

Kata kunci: Relaksasi pajak; sosialisasi pajak; pelayanan pajak; kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor; kalimantan timur

The effect of tax relaxation, tax socialization, and tax services on WPKB compliance in East Kalimantan

Abstract

The purpose of this study was to determine the effect of tax relaxation, tax socialization, and tax services on motor vehicle taxpayer compliance in East Borneo. The types and sources of data from this study are quantitative using primary data and using likert scale measurements. Determination of the sample in this study using purposive sampling with total sample is 100 respondents of motor vehicle taxpayers registered in Badan Pendapatan Daerah of East Borneo. The method of analysis in this study is multiple linear regression analysis which is processed using the SPSS version 22 program. The results of this study indicate that tax relaxation and tax services have an effect on compliance with motor vehicle taxpayers in East Kalimantan, while tax socialization has no effect on motor vehicle taxpayer compliance in East Kalimantan.

Key words: *Tax relaxation; tax socialization; tax services; motor vehicle taxpayer compliance; east borneo*

PENDAHULUAN

Kontribusi pajak dalam penerimaan negara dapat dikatakan termasuk tinggi dan tidak mudah untuk mencapai hal tersebut. Pemerintah harus memikirkan berbagai cara dalam mengambil langkah agar para wajib pajak dapat patuh melakukan pembayaran pajak. Menurut Padyanoor (2020), setelah pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) menyerang beberapa negara di dunia pada akhir tahun 2019 dan merambah ke Indonesia pada awal tahun 2020, banyak negara di dunia khususnya di Indonesia yang terkena dampak dari pandemi tersebut pun mengalami kesulitan ekonomi. Pandemi Covid-19 melumpuhkan hampir sebagian besar ekonomi di Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia pun mengambil langkah dalam hal perpajakan yaitu dengan adanya insentif dan relaksasi pajak terhadap pajak yang berlaku di Indonesia guna mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Salah satu insentif dan relaksasi pajak yang dilakukan oleh pemerintah tidak hanya dilakukan pada Pajak Pusat tetapi juga pada Pajak Daerah. Salah satunya yaitu relaksasi pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang menjadi bagian dari Pajak Daerah sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak daerah sangat berperan besar dalam upaya kesejahteraan masyarakat dengan membayar Pajak Daerah salah satunya dengan membayar PKB. Namun pada kenyataannya, rendahnya kepatuhan wajib pajak di Kalimantan Timur juga menjadi suatu permasalahan, terlebih lagi ketika adanya pandemi Covid-19. Kondisi tersebut terlampir dalam tabel berikut:

Tabel 1.

Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kalimantan Timur Periode 2018-2020

Bulan	2018		2019		2020	
	Objek	Rp	Objek	Rp	Objek	Rp
Jan	106.907	70.681.745.106	111.919	77.407.820.805	115.844	97.314.954.323
Feb	91.181	60.051.849.221	96.195	68.955.843.093	102.852	86.713.519.979
Mar	99.678	68.690.977.156	99.760	79.930.229.305	91.137	75.808.181.114
Apr	94.294	65.318.035.885	97.684	77.683.814.752	21.314	19.300.174.659
Mei	99.320	66.771.303.589	107.227	8.610.449.604	22.365	21.452.555.760
Jun	78.502	49.301.214.108	82.521	61.209.240.310	202.399	148.953.943.517
Jul	114.824	74.325.151.929	121.288	90.522.664.250	127.050	97.891.070.654
Agu	106.779	67.098.138.466	115.835	85.534.402.437	105.550	75.710.196.309
Sep	105.520	68.420.332.883	117.540	88.944.308.422	106.831	80.737.410.951
Okt	120.275	80.368.047.546	118.571	92.373.816.929	96.082	69.927.832.572
Nov	119.979	81.891.668.534	107.422	85.793.074.870	110.798	82.330.543.629
Des	140.529	104.194.632.140	108.288	88.775.147.446	110.750	86.334.427.422
Total	1.277.788	857.113.096.563	1.284.250	983.740.812.223	1.212.972	942.474.810.889

Berdasarkan tabel diatas, pembayaran PKB oleh wajib pajak kendaraan bermotor tidak konsisten dan menurun drastis di tahun 2020 sehingga dapat dikatakan tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah. Oleh sebab itu, pemerintah daerah Kalimantan Timur turut mengambil langkah yaitu dengan memberlakukan relaksasi pajak berupa pemberian keringanan dan pembebasan sanksi administrasi PKB pada PKB di Kalimantan Timur agar target pembayaran pajak tercapai. Faktor-faktor lain seperti sosialisasi pajak dan pelayanan pajak yang diberikan kepada wajib pajak kendaraan bermotor juga ikut menjadi penentu atas tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan fenomena di atas, peneliti ingin mengetahui apakah terdapat pengaruh relaksasi pajak, sosialisasi pajak, dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (WPKB) di Kalimantan Timur dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh relaksasi pajak, sosialisasi pajak, dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan WPKB di Kalimantan Timur.

METODE

Pengukuran Variabel

Relaksasi pajak yaitu suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan kemudahan dalam pembayaran kepada wajib pajak kendaraan bermotor di Kalimantan Timur. Adapun indikator yang digunakan dalam variabel relaksasi pajak, yaitu:

Wajib pajak kendaraan bermotor merasa terbantu; dan
Tidak merugikan wajib pajak kendaraan bermotor.

Sosialisasi pajak merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada wajib pajak kendaraan bermotor agar berkontribusi dalam membayar PKB. Adapun indikator yang digunakan dalam variabel sosialisasi pajak, yaitu:

Mengadakan penyuluhan berkaitan dengan PKB kepada wajib pajak;

Informasi mengenai PKB disampaikan dengan jelas;

Efektif dan inovatif dalam mempublikasikan PKB.

Pelayanan pajak merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh petugas pajak dengan menyediakan dan membantu setiap kebutuhan yang diperlukan wajib pajak kendaraan bermotor dalam pembayaran PKB di Kalimantan Timur. Adapun indikator yang digunakan dalam variabel pelayanan pajak, yaitu:

Letak atau lokasi pembayaran PKB yang strategis dan nyaman;

Petugas pajak memiliki kejujuran dalam menjalankan tugasnya kepada wajib pajak kendaraan bermotor;

Petugas pajak bekerja secara kooperatif dalam membantu wajib pajak kendaraan bermotor.

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak kendaraan bermotor di Kalimantan Timur taat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya secara disiplin serta tidak menyimpang dari peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Adapun indikator yang digunakan dalam variabel kepatuhan wajib pajak, yaitu:

Wajib pajak kendaraan bermotor mampu memenuhi kewajiban dalam membayar PKB pada tahun pajak pembayaran kendaraan bermotor;

Wajib pajak kendaraan bermotor membayar PKB sebelum jatuh tempo.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di BAPENDA Provinsi Kalimantan Timur hingga tahun 2021 yang berjumlah 2.791.755 wajib pajak kendaraan bermotor. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yang mana menurut Sugiyono (2017) *purposive sampling* yaitu menentukan sampel dengan adanya pertimbangan tertentu. Adapun kriteria yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

Wajib pajak kendaraan bermotor yang berada di Kalimantan Timur;

Wajib pajak kendaraan bermotor yang memiliki kendaraan bermotor pribadi dan mengurus kewajiban pajak kendaraan bermotornya sendiri;

Jenis kendaraan bermotor yang dimiliki wajib pajak kendaraan bermotor adalah roda 2 (dua) yaitu motor dan roda 4 (empat) yaitu mobil atau keduanya.

Adapun rumus untuk menghitung ukuran sampel dari populasi yang diketahui tersebut adalah dengan menggunakan rumus Slovin yang menghasilkan perhitungan sebesar 99,99 yang dibulatkan menjadi 100 sehingga ukuran sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebesar 100 responden. Adapun 100 responden tersebut diwakili oleh masing-masing kabupaten/kota yang ada di Kalimantan Timur, yaitu: Balikpapan, Berau, Bontang, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Paser, Penajam Paser Utara, dan Samarinda.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa kuesioner yang disebarkan melalui internet. Pernyataan dalam kuesioner diukur dengan menggunakan skala *likert*. Adapun pemberian skor skala likert adalah seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.
Skala *Likert*

Kriteria Penilaian	Skor
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Ragu-ragu (RR)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data kuantitatif, yang mana menurut Sugiyono (2017) ialah data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung baik berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer, yang mana menurut Sugiyono (2017) ialah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian yaitu dengan cara survei kuesioner kepada wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di BAPENDA Provinsi Kalimantan Timur.

Pengujian Instrumen

Dalam penelitian ini, pengujian instrumen dilakukan dengan uji validitas dan uji reliabilitas menggunakan *Statistical Product and Service Solutions* (SPSS) versi 22. Standar pengujian validitas sebagai berikut:

Jika $< 0,05$ dan bernilai positif, maka instrumen atau soal memiliki korelasi yang signifikan dengan skor total dan uji tersebut dapat dinyatakan valid;

Jika $< 0,05$ dan bernilai negatif, maka tidak ada korelasi yang signifikan antara instrumen atau soal dengan skor total dan uji tersebut dapat dinyatakan tidak valid;

Jika $> 0,05$, maka tidak ada korelasi yang signifikan antara instrumen atau soal dengan skor total dan uji tersebut dapat dinyatakan tidak valid.

Standar pengujian reliabilitas sebagai berikut:

Jika nilai *Cronbach Alpha* $> 0,60$ maka setiap butir pertanyaan atau pernyataan pada setiap variabel dapat dinyatakan normal;

Jika nilai *Cronbach Alpha* $< 0,60$ maka setiap butir pertanyaan atau pernyataan pada setiap variabel dapat dinyatakan tidak normal.

Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan uji asumsi klasik: uji normalitas; uji multikolinearitas; dan uji heteroskedastisitas, analisis regresi linear berganda, uji koefisien determinasi (R square), uji kelayakan model (uji F), dan uji hipotesis (uji t) menggunakan *Statistical Product and Service Solutions* (SPSS) versi 22. Standar pengujian normalitas sebagai berikut:

Jika $> 0,05$, variabel dapat dinyatakan normal;

Jika $< 0,05$, variabel dapat dinyatakan tidak normal.

Standar pengujian multikolinearitas sebagai berikut:

Jika nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) $< 10,00$, maka tidak terjadi multikolinearitas;

Jika nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) $> 10,00$, maka terjadi multikolinearitas.

Standar pengujian heteroskedastisitas sebagai berikut:

Jika terdapat pola tertentu, misalnya titik-titik yang ada membentuk pola beraturan tertentu (seperti bentuk gelombang, awalnya melebar kemudian menyempit), maka telah terjadi heteroskedastisitas;

Jika titik-titik tidak berpola atau tidak memiliki pola yang jelas, tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja, dan tersebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0, maka tidak ada heteroskedastisitas.

Rumus yang digunakan untuk menghitung analisis regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

α adalah konstanta

β_1 adalah koefisien β untuk variabel relaksasi pajak

β_2 adalah koefisien β untuk variabel sosialisasi pajak

β_3 adalah koefisien β untuk variabel pelayanan pajak

X_1 adalah relaksasi pajak

X_2 adalah sosialisasi pajak

X_3 adalah pelayanan pajak

e adalah *error*

Standar pengujian koefisien determinasi (R Square) dengan berkisar dari 0 (nol) sampai 1 (satu). Jika nilai R Square semakin mendekati 1 artinya nilai variabel independen mempunyai kemampuan yang sangat kuat untuk menentukan perubahan nilai variabel dependen, begitu pula sebaliknya.

Standar pengujian kelayakan model (uji F) sebagai berikut:

Jika nilai signifikansi $< 0,05$, maka terdapat pengaruh variabel independen (X) secara simultan terhadap variabel dependen (Y);

Jika nilai signifikansi $> 0,05$, maka tidak terdapat pengaruh variabel independen (X) secara simultan terhadap variabel dependen (Y).

Standar pengujian hipotesis (uji t) sebagai berikut:

Jika nilai signifikansi $< 0,05$, maka terdapat pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y);

Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka tidak terdapat pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui kevalidan kuesioner dilihat dari instrumen pernyataan relaksasi pajak, sosialisasi pajak, pelayanan pajak, dan kepatuhan wajib pajak yang dapat benar-benar mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur dari kuesioner tersebut oleh responden penelitian. Berdasarkan Tabel 4 berikut, hasil uji validitas pada variabel relaksasi pajak (X_1) yang berisi 4 item pernyataan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 dimana $< 0,05$ sehingga variabel relaksasi pajak dinyatakan valid.

Tabel 3.
Hasil Uji Validitas Variabel Relaksasi Pajak

Item	Nilai Signifikansi	Standar Pengujian	Keterangan
X _{1.1}	0,000	0,05	Valid
X _{1.2}	0,000	0,05	Valid
X _{1.3}	0,000	0,05	Valid
X _{1.4}	0,000	0,05	Valid

Berdasarkan Tabel 4 berikut, hasil uji validitas pada variabel sosialisasi pajak (X_2) yang berisi 6 item pernyataan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 dimana $< 0,05$ sehingga variabel sosialisasi pajak dinyatakan valid.

Tabel 4.
Hasil Uji Validitas Variabel Sosialisasi Pajak

Item	Nilai Signifikansi	Standar Pengujian	Keterangan
X _{2.1}	0,000	0,05	Valid
X _{2.2}	0,000	0,05	Valid
X _{2.3}	0,000	0,05	Valid
X _{2.4}	0,000	0,05	Valid
X _{2.5}	0,000	0,05	Valid
X _{2.6}	0,000	0,05	Valid

Berdasarkan Tabel 5 berikut, hasil uji validitas pada variabel pelayanan pajak (X_3) yang berisi 6 item pernyataan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 dimana $< 0,05$ sehingga variabel pelayanan pajak dinyatakan valid.

Tabel 5.
Hasil Uji Validitas Variabel Pelayanan Pajak

Item	Nilai Signifikansi	Standar Pengujian	Keterangan
X _{3.1}	0,000	0,05	Valid
X _{3.2}	0,000	0,05	Valid
X _{3.3}	0,000	0,05	Valid
X _{3.4}	0,000	0,05	Valid
X _{3.5}	0,000	0,05	Valid
X _{3.6}	0,000	0,05	Valid

Berdasarkan Tabel 6 berikut, hasil uji validitas pada variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y) yang berisi 4 item pernyataan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 dimana $< 0,05$ sehingga variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dinyatakan valid.

Tabel 6.
Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Item	Nilai Signifikansi	Standar Pengujian	Keterangan
Y ₁	0,000	0,05	Valid
Y ₂	0,000	0,05	Valid
Y ₃	0,000	0,05	Valid
Y ₄	0,000	0,05	Valid

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur kuesioner yang telah dibuat reliabel dan dapat digunakan di penelitian lainnya atau selanjutnya dengan karakteristik yang sama dilihat dari kekonsistenan jawaban responden. (Ghozali, 2013) Dari Tabel 7 berikut, hasil uji validitas pada variabel relaksasi pajak memiliki nilai $0,909 > 0,60$ sehingga variabel relaksasi pajak dinyatakan reliabel. Variabel sosialisasi pajak memiliki nilai $0,918 > 0,60$ sehingga variabel relaksasi pajak dinyatakan reliabel. Variabel pelayanan pajak memiliki nilai $0,931 > 0,60$ sehingga variabel relaksasi pajak dinyatakan reliabel. Variabel kepatuhan WPKB memiliki nilai $0,851 > 0,60$ sehingga variabel relaksasi pajak dinyatakan reliabel.

Tabel 7.
Hasil Uji Reliabilitas Seluruh Variabel

Variabel	Cronbach Alpha	Standar Pengujian	Keterangan
Relaksasi Pajak (X ₁)	0,909	0,60	Reliabel
Sosialisasi Pajak (X ₂)	0,918	0,60	Reliabel
Pelayanan Pajak (X ₃)	0,931	0,60	Reliabel
Kepatuhan WPKB (Y)	0,851	0,60	Reliabel

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui dalam model regresi semua variabel yaitu relaksasi pajak, sosialisasi pajak, pelayanan pajak, dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kalimantan Timur berdistribusi normal atau tidak agar data tersebut dapat menggeneralisasi populasi. Dari Tabel 9 berikut, hasil uji normalitas menunjukkan bahwa memiliki nilai signifikansi 0,192 dimana $> 0,05$ sehingga data berdistribusi normal.

Tabel 8.
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	2,11588049
Most Extreme Differences	Absolute	0,074
	Positive	0,069
	Negative	-0,074
Test Statistic		0,074
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,192 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat interkorelasi (hubungan yang kuat) antar variabel independen yaitu relaksasi pajak, sosialisasi pajak, dan pelayanan pajak tetapi tidak tergejala multikolinearitas karena jika ada gejala atau masalah multikolinearitas, beberapa variabel akan mengganggu sebab menghasilkan parameter yang mirip. Dari Tabel 10 berikut, hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa variabel independen yaitu relaksasi

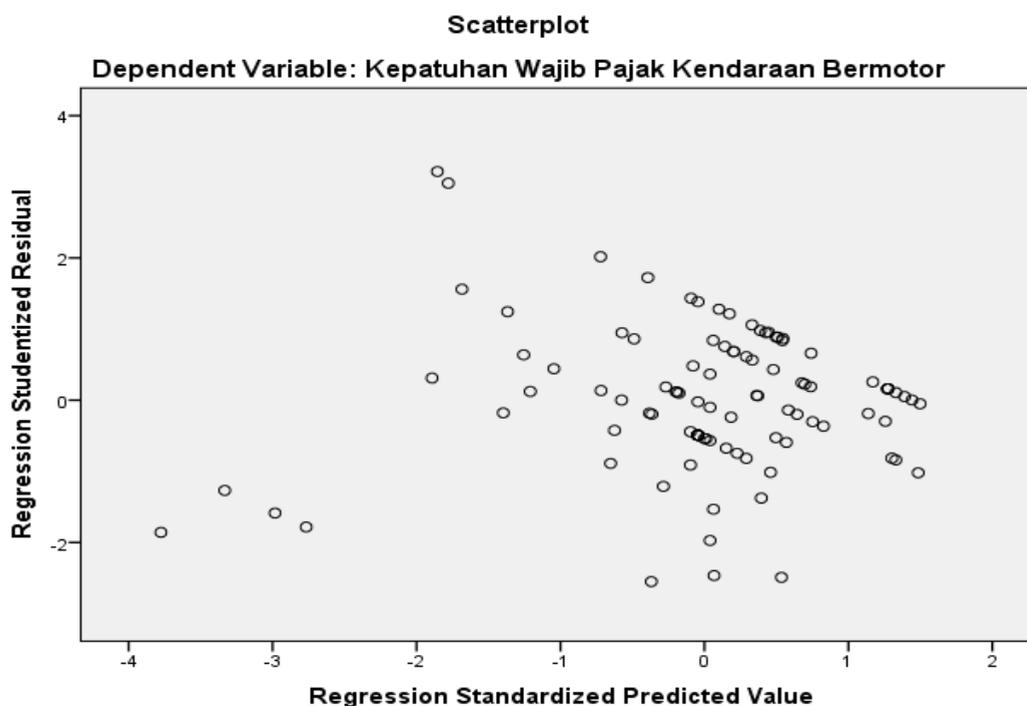
pajak memiliki nilai VIF 2,147, sosialisasi pajak memiliki nilai VIF 1,617, dan pelayanan pajak memiliki nilai VIF 1,996 memiliki nilai signifikansi 0,192 yang mana nilai VIF semua variabel independen < 10,00 sehingga dapat dinyatakan bahwa tidak terjadi masalah atau gejala multikolinearitas.

Tabel 9.
 Uji Multikolinearitas

Collinearity Statistics	
Tolerance	VIF
0,466	2,147
0,619	1,617
0,501	1,996

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan agar mengetahui sama atau tidaknya nilai sisa dalam model regresi antara satu pengamatan dengan pengamatan lainnya sehingga tidak terjadi gejala atau masalah heteroskedastisitas yang akan berakibat pada sebuah keraguan atau ketidakakuratan. (Gani & Amalia, 2018) Dari Gambar 1 berikut, hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa titik-titik tidak berpola atau tidak memiliki pola yang jelas, tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja, dan tersebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0 sehingga dapat dinyatakan bahwa tidak terjadi masalah atau gejala heteroskedastisitas.



Gambar 1.
 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk menjelaskan hubungan fungsional dari 2 (dua) atau lebih variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) yang mana dalam hal ini menjelaskan hubungan fungsional dari variabel relaksasi pajak, sosialisasi pajak, dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dari hasil analisis regresi linear berganda yang dilakukan, didapatkan persamaan regresi linear berganda berikut:

$$Y = 6,595 + 0,270X_1 - 0,56X_2 + 0,311X_3 + e$$

Hasil persamaan regresi linear berganda diatas dapat diartikan sebagai berikut:

Nilai konstanta (α) sebesar 6,595 menunjukkan bahwa jika seluruh variabel independen yaitu relaksasi pajak, sosialisasi pajak, dan pelayanan pajak konstan atau bernilai 0, maka nilai variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 6,595;

Nilai koefisien regresi relaksasi pajak (X_1) yaitu sebesar 0,270 yang dapat diartikan adanya pengaruh positif variabel relaksasi pajak (X_1) terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y). Hal tersebut berarti jika nilai koefisien regresi relaksasi pajak (X_1) memiliki kenaikan 1 (satu) satuan, maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan terjadi peningkatan sebesar 0,270;

Nilai koefisien regresi sosialisasi pajak (X_2) yaitu sebesar -0,056 yang dapat diartikan adanya pengaruh negatif variabel sosialisasi pajak (X_2) terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y). Hal tersebut berarti jika nilai koefisien regresi sosialisasi pajak (X_2) memiliki kenaikan 1 (satu) satuan, maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan terjadi penurunan sebesar 0,056; dan

Nilai koefisien regresi pelayanan pajak (X_3) yaitu sebesar 0,311 yang dapat diartikan adanya pengaruh positif variabel pelayanan pajak (X_3) terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y). Hal tersebut berarti jika nilai koefisien regresi pelayanan pajak (X_3) memiliki kenaikan 1 (satu) satuan, maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan terjadi peningkatan sebesar 0,311.

Uji Koefisien Determinasi (R Square)

Uji koefisien determinasi (R square) dilakukan untuk mengetahui proporsi atau persentase variasi perubahan nilai-nilai variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang ditentukan oleh variasi perubahan nilai-nilai variabel independen yang lebih dari satu yaitu relaksasi pajak, sosialisasi pajak, dan pelayanan pajak. Dari Tabel berikut, hasil uji koefisien determinasi (R square) adalah 0,467 atau sebesar 46,7% yang memiliki arti bahwa variabel relaksasi pajak, sosialisasi pajak, dan pelayanan pajak bisa menjelaskan variasi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 0,467 atau 46,7%. Adapun 53,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 10.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R Square)
 Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,684 ^a	0,467	0,451	2,149

a. Predictors: (Constant), Pelayanan Pajak, Sosialisasi Pajak, Relaksasi Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji F dilakukan untuk menguji kelayakan model regresi agar dapat digunakan untuk mengestimasi populasi pada penelitian. (Gani & Amalia, 2018) Dari Tabel 11 berikut, hasil uji kelayakan model (uji F) pada tabel Anova menunjukkan bahwa nilai signifikansi menunjukkan nilai sebesar 0,000 dimana $< 0,05$ yang memiliki arti bahwa model regresi dinyatakan layak.

Tabel 11.

Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	388,822	3	129,607	28,073	0,000 ^b
	Residual	443,218	96	4,617		
	Total	832,040	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

b. Predictors: (Constant), Pelayanan Pajak, Sosialisasi Pajak, Relaksasi Pajak

Uji Hipotesis (Uji t)

Uji t dilakukan untuk mengetahui signifikansi hipotesis pada model regresi dalam variabel relaksasi pajak, sosialisasi pajak, dan pelayanan pajak terhadap variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dari Tabel 12 berikut, hasil uji hipotesis (uji t) menunjukkan bahwa:

Relaksasi pajak memiliki tingkat signifikan sebesar 0,004 dimana nilai signifikan tersebut $< 0,05$ dan memiliki nilai koefisien regresi dengan arah positif sebesar 0,270. Dengan demikian dapat diartikan relaksasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang memiliki arti

bahwa relaksasi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga hipotesis pertama (H_1) yaitu relaksasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor diterima;

Sosialisasi pajak memiliki tingkat signifikan sebesar 0,251 dimana $> 0,05$ dan memiliki nilai koefisien regresi dengan arah negatif sebesar -0,056. Dengan demikian dapat diartikan sosialisasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sehingga hipotesis kedua (H_2) yaitu sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor ditolak; dan

Pelayanan pajak memiliki tingkat signifikan sebesar 0,000 dimana $< 0,05$ dan memiliki nilai koefisien regresi dengan arah positif sebesar 0,311. Dengan demikian dapat diartikan pelayanan pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga sedangkan hipotesis ketiga (H_3) yaitu pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor diterima.

Tabel 12.
 Hasil Uji Hipotesis (Uji t)

Model		Coefficients ^a			t	Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6,595	1,195		5,518	0,000
	Relaksasi Pajak	0,270	0,091	0,324	2,965	0,004
	Sosialisasi Pajak	-0,056	0,048	-0,109	-1,156	0,251
	Pelayanan Pajak	0,311	0,068	0,485	4,605	0,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Pengaruh Relaksasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pada pengujian hipotesis pertama (H_1) yang telah dilakukan pada variabel relaksasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, diperoleh tingkat signifikan sebesar 0,004 dan koefisien regresi 0,270 dengan arah positif, artinya relaksasi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kalimantan Timur. Koefisien regresi dengan arah positif mengartikan peningkatan relaksasi pajak maka berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang semakin meningkat.

Dari asumsi di atas, dapat disimpulkan bahwa keringanan yang diberikan kepada wajib pajak kendaraan bermotor berupa relaksasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kalimantan Timur karena dianggap kebijakan relaksasi pajak tersebut memberikan manfaat, meringankan atau tidak memberatkan, dan wajib pajak kendaraan bermotor merasa terbantu dalam membayar pajak kendaraannya yang berakibat kepatuhan wajib pajak meningkat.

Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pada pengujian hipotesis kedua (H_2) yang telah dilakukan pada variabel sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, diperoleh tingkat signifikan sebesar 0,251 dan koefisien regresi -0,056 dengan arah negatif, artinya sosialisasi pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kalimantan Timur. Koefisien regresi dengan arah negatif mengartikan peningkatan sosialisasi pajak berdampak terhadap penurunan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Dari asumsi di atas, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi pajak yang diberikan kepada wajib pajak kendaraan bermotor di Kalimantan Timur dari tahun ke tahun meningkat tetapi belum tentu meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sosialisasi pajak yang dilakukan sudah baik di tempat tertentu, tetapi kurang terjamah ke beberapa tempat tertentu lainnya sehingga kurang tersampainya informasi dan kurang membantu wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak kendaraannya yang diketahui dari pertanyaan yang ditanyakan peneliti kepada beberapa wajib pajak yang merupakan responden penelitian yang berada selain di Kota Samarinda. Hal tersebut belum signifikan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kalimantan Timur.

Pengaruh Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pada pengujian hipotesis ketiga (H_3) yang telah dilakukan pada variabel pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, diperoleh tingkat signifikan sebesar 0,000 dan koefisien regresi 0,311 dengan arah positif, artinya pelayanan pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kalimantan Timur. Koefisien regresi dengan arah positif mengartikan positif mengartikan peningkatan pelayanan pajak maka berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang semakin meningkat.

Dari asumsi di atas, dapat disimpulkan bahwa pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kalimantan Timur karena dianggap pelayanan pajak baik tempat pembayaran pajak yang strategis, fasilitas yang memadai, dan petugas pajak yang cakap dan tanggap serta bekerja secara profesional membuat wajib pajak kendaraan bermotor merasa terbantu dalam membayar pajak kendaraannya yang berakibat kepatuhan wajib pajak meningkat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Relaksasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kalimantan Timur dikarenakan kebijakan relaksasi pajak memberikan manfaat, meringankan atau tidak memberatkan, dan wajib pajak kendaraan bermotor merasa terbantu dalam membayar pajak kendaraannya yang berakibat kepatuhan wajib pajak meningkat.

Sosialisasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kalimantan Timur dikarenakan sosialisasi pajak yang diberikan kepada wajib pajak kendaraan bermotor di Kalimantan Timur dari tahun ke tahun meningkat tetapi belum tentu meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kalimantan Timur dikarenakan pelayanan pajak baik tempat pembayaran pajak yang strategis, fasilitas yang memadai, dan petugas pajak yang cakap dan tanggap serta bekerja secara profesional membuat wajib pajak kendaraan bermotor merasa terbantu dalam membayar pajak kendaraannya yang berakibat kepatuhan wajib pajak meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Damayanthi, I. G. A. E., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Dosen Akuntansi Pada Perguruan Tinggi Di Propinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana ISSN: 2302-8556*.
- Gani, I., & Amalia, S. (2018). *Alat Analisis Data Aplikasi Statistik untuk Penelitian Bidang Ekonomi & Sosial* (P. Christian (ed.); 2nd ed.). Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21* (7th ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Juliantari, N. K. A., Sudiartana, I. M., & Dicriyani, N. L. G. M. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak, dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Gianyar. *Jurnal Kharisma*, 3(1), 128–139.
- Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 973/K.77/2022 Tentang Pembebasan Tarif Progresif atas Kepemilikan Kendaraan Bermotor Kedua dan Seterusnya. (2022).
- Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 973.1/K.126/2021 Tentang Pemberian Keringanan PKB berupa Pembebasan Tarif Progresif atas Kepemilikan KB Kedua dst, (2021).
- Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 973.1/K.633/2021 Tentang Pemberian Keringanan PKB dan Pembebasan Sanksi Administrasi PKB, (2021).
- Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 973/K.298/2021 Tentang Keringanan PKB, Pembebasan Sanksi Administrasi PKB, dan Pembebasan Tarif Progresif atas Kepemilikan KB Kedua dst, (2021).

- Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 973/K.299/2021 Tentang Keringanan Pokok Pajak dan Pembebasan Sanksi Administrasi BBNKB, (2021).
- Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 973/K.410/2021 Tentang Keringanan PKB berupa Pembebasan Tarif Progresif atas Kepemilikan KB Kedua dst, (2021).
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), (2020).
- Nurmawati, A., Saputri, A. M., & Fadilah, R. A. N. (2021). *RELAKSASI PAJAK SEBAGAI LANGKAH KEBIJAKAN PEMERINTAH DI MASA PANDEMI*. 1(1), 73–79.
- Padyanoor, A. (2020). Kebijakan Pajak Indonesia Menanggapi Krisis COVID-19: Manfaat bagi Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(9), 2216.
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur, (2019).
- Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Keringanan PKB dan Pembebasan Sanksi Administrasi PKB, (2020).
- Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Keringanan Pokok Pajak dan Pembebasan Sanksi Administrasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas Penyerahan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Kedua dan Seterusnya Tahun 2020, (2020).
- Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor, (2020).
- Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pembebasan Sanksi Administrasi PKB, (2020).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, (2013).
- Rahayu, C., & Amirah. (2018). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT)). *Permana*, 10(2), 142–155.
- Rusmayani, N. M. L., & Supadmi, N. L. (2017). Pengaruh Sosialisasi, Pengetahuan, Sanksi Dan Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana ISSN: 2302-8556*, 20(1), 173–201.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI).
- Sugiyono. (2017). *Metodologi Penelitian Bisnis; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D* (Y. S. Suryandari (ed.); 3rd ed.). Bandung: Anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI).
- Utami, S., & Amanah, L. (2018). Pengaruh Sosialisasi, Pengetahuan Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 7(4), 1–22.
- Widjantie, T. D., & Anwar, S. (2020). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan). *Behavioral Accounting Journal*, 3(2), 129–143.
- Widya Sasana, L. P., Indrawan, I. G. A., & Hermawan, R. (2021). Pengaruh Program Pemutihan Pajak dan Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 5(2), 127.

- Winerungan, O. L. (2013). *Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP Di KPP Manado dan KPP Bitung*. 1(3), 960–970.
- Wiratna Sujarweni, V. (2015). *SPSS untuk Penelitian*. Yogyakarta: Yogyakarta Pustaka Baru Press.
- Yuandari, E., & Rahman, R. T. A. R. (2017). *Metodologi Penelitian dan Statistik*. Bogor: Anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI).